



# RENJA TAHUN 2024

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KALAMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 206).

Untuk menjabarkan tugas-tugas yang diembannya sebagaimana tersebut diatas, berpedoman pada Rencana Strategis 2024-2026 selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai pada Tahun 2024 dan sekaligus merupakan tolak ukur keberhasilan dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2024 perlu disusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya telah menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, Juli 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Barat



Ors JUNAIDI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650809 198603 1 012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
1. 1. Latar Belakang.....	3
1. 2. Landasan Hukum.....	4
1. 3. Maksud dan Tujuan.....	6
1. 4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..	8
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3. 3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	40
BAB V : PENUTUP.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar tahun 2024 diawali dengan menjaring masukan/usulan kegiatan melalui forum OPD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik Pembina Dinas KUMKM Provinsi/Kabupaten/Kota, Lintas instansi, Tokoh masyarakat, sehingga rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan provinsi sejalan dan mengakomodir Kabupaten kota dengan tetap memperhatikan asas prioritas, kebutuhan dan efisiensi dalam penganggaran. Dalam proses penyusunan rencana kerja yang selanjutnya dibahas dan diverifikasi oleh Bappeda mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar tahun 2024-2026. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai pedoman tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu rencana kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar diupayakan tetap sinergi dengan

rencana kerja Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait capaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya. Selanjutnya rencana kerja tahunan dijadikan dasar dalam proses penyusunan RAPBD Provinsi Kalbar tahun 2024, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang cukup penting didalam upaya mewujudkan peningkatan dan pengembangan usaha KUMKM. Pengembangan KUMKM dilaksanakan dengan tujuan untuk memantapkan peran KUMKM melalui pengembangan kelembagaan KUMKM, membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya, meningkatkan kemampuan KUMKM didalam pemanfaatan sumber daya produktif, mengembangkan sikap kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha, serta meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen KUMKM, sehingga Koperasi menjadi volume usaha koperasi dan UMKM meningkat sesuai dengan indicator dan target yang telah ditentukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

## **1. 2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang No 9 tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019;



### **1. 3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan menentukan :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
2. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
3. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
4. Pagu Indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
2. Mengevaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun sebelumnya
4. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

### **1. 4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 adalah :

#### **Bab I   Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

## **Bab V Penutup**



## **BAB II**

### **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

#### **2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program/ kegiatan/ Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB ) Perangkat Daerah (Nilai)</b>	<b>85</b>		<b>A</b>	<b>BB</b>	<b>77</b>			
		<b>2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)</b>	<b>85</b>		<b>A</b>	<b>BB</b>	<b>74</b>			
<b>2.17.01.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>% penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>		
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	3 Dokumen		
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Laporan		
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	1 Laporan		

<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>		<b>2 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>4 laporan</b>		
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100 %	60 orang		
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	-	-	-		
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100 %	1 Laporan		
<b>2.17.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-		
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-		
<b>2.17.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>% pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7 Dok</b>		
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	86 Stel	211 stel	211 stel	100 %	1 Pkt		
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100 %	3 Dokumen		
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	-		
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen laporan kinerja individu	-	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 Dokumen		
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	6 Orang	20 org	9 org	60 %	20 Orang		
2.17.01.1.05.0001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	-	20 Orang	-	-	-	-		
<b>2.17.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>8 Dokumen</b>		
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	15 Jenis	36 jenis	36 jenis	100 %	1 Paket		
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	61 Jenis	38 jenis	38 jenis	100 %	3 Paket		

2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3 Paket	3 Jenis	31 jenis	31 jenis	100 %	3 Paket		
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	1136 Porsi	1136 porsi	1136 porsi	100 %	2 Paket		
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	9 Jenis 27906 Lembar	40307 lembar	40307 lembar	100 %	2 Paket		
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dokumen	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 %	1 Dokumen		
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	32 Kali	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 Laporan		
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-	-	-		
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen		
<b>2.17.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100 %</b>			
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	-	6 Unit	7 Unit	7 Unit	100 %	-		
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18 unit	4 Item	7 Jenis	7 Jenis	100 %	18 Unit		
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1 unit	-	-	-	-	-		
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit		
<b>2.17.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 laporan	118 Paket	98 bh	98 bh	100 %	1 laporan		
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3 laporan	12 Bulan	12 bln	12 bln	100 %	3 Laporan		
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7 Laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100 %	7 Laporan		
<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100 %</b>			
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	14 Unit	4 unit	4 unit	100 %	2 Unit		

2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	126 Unit	164 Unit	210 unit	210 unit	100 %	126 Unit		
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	2 Gedung	1 gedung	1 gedung	100 %	1 Gedung		
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	-	1 gedung	1 gedung	100 %	1 Gedung		
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Prosentase koperasi simpan pinjam/unit simpan yang memiliki ijin usaha</b>	<b>86,44%</b>	<b>61,38%</b>	<b>74,84%</b>	<b>84,75 %</b>	<b>113 %</b>	<b>91.25 Persen</b>		
<b>2.17.02.1.01</b>	<b>Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>40 Izin</b>	<b>50 Izin</b>	<b>50 Izin</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>		
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	8 izin	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	5 Unit Usaha		
<b>2.17.02.1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>100 persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	8 Unit Usaha	-	-	-	-	5 Unit Usaha		
2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi yang dapat mengakses Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	5 unit usaha		
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>	<b>5 %</b>	<b>9.74 %</b>	<b>195 %</b>	<b>8 Persen</b>		
<b>2.17.03.1.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</b>	<b>37%</b>	<b>130 Koperasi</b>	<b>35.97 %</b>	<b>30,52 %</b>	<b>85 %</b>	<b>37 Persen</b>		
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberi Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	50 Dok	1 Dokumen	50 Koperasi	58 Koperasi	116 %	-		

2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	50 Kop	2 Dokumen	50 kop	36 kop	72 %	100 koperasi		
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 koperasi							
<b>2.17.03.1.02</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang</b>	<b>Prosentase KSP/USP yang diawasi dan diperiksa</b>	-	-	-	-	-	-		
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesyukuran, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesyukuran, dan Memberikan Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	-	-	-	-	-	-		
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Prosentase Penilaian Kesehatan KSP/USP</b>	<b>25 %</b>	<b>5%</b>	<b>15%</b>	<b>35,29 %</b>	<b>235%</b>	<b>25 Persen</b>		
<b>2.17.04.1.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya</b>	<b>94.10 %</b>	<b>150 koperasi</b>	<b>92,59%</b>	<b>86,44</b>	<b>93%</b>	<b>94 Persen</b>		
2.17.04.1.01.01	Penilaian Pemodal, Kualitas, Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri, Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Pemodal, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	-	1 Dokumen	50 Kop	51 Kop	102 %	50 Koperasi		
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodal	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	80 koperasi							
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Dokumen Koperasi yang Sehat	-	1 Dokumen	-	-	-	-		
<b>2.17.05</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkat Pemahamannya</b>	<b>100 %</b>		<b>88,89%</b>	<b>100%</b>	<b>112%</b>	<b>95,24 Persen</b>		
<b>2.17.05.1.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 Persen</b>		
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	210 orang	150 org	450 org	420 org	93%	450 Orang		
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Volume Usaha Koperasi (Rp)</b>	<b>6.025.000.000.000</b>	<b>3%</b>	<b>4 %</b>	<b>17,07 %</b>	<b>427 %</b>	<b>5 Persen</b>		
<b>2.17.06.1.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Koperasi yang diberdayakan</b>	<b>63,45%</b>	<b>252 Koperasi</b>	<b>97,84 %</b>	<b>38,59 %</b>	<b>39,43 %</b>	<b>97.84 Persen</b>		
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	-	6 Dokumen	60 Kop	60 Kop	100%	130 Unit Usaha		

2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	120 unit usaha	2 Dokumen	92 Kop	92 Kop	100%	200 Unit Usaha		
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	80 keluarga	-	-	-	-	-		
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	100 unit usaha							
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Prosentase Pertumbuhan UMKM (%)</b>	<b>0,76 %</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,45%</b>	<b>0,14 %</b>	<b>10 %</b>	<b>1.47 Persen</b>		
<b>2.17.07.1.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1. Prosentase Usaha Kecil yang Diberdayakan 2. Pertumbuhan Wirausaha (Wirausaha) 3. Prosentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal</b>	<b>3,33% 16.364 9.470</b>	<b>2 Persen - -</b>	<b>2,36 % - -</b>	<b>5,39 % - -</b>	<b>229 % - -</b>	<b>2.36 Persen - -</b>		
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	60 Unit Usaha	360 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	1.420 Pelaku Usaha	1136	12 Unit Usaha		
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	60 Orang	-	-			90 Orang		
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	500 unit usaha							
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	210 org							
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	3 unit usaha							
2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	40 unit usaha							
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	40 unit usaha							



2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	1. Presentase Usaha Kecil yang berkembang 2. Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya 3. Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	- - 0.94 %	0,03% - -	0,04% 89,39 % -	0,20 % 93,02 % -	503% 104 % -	0.05 Persen 90.28 % -		
2.17.08.1.01	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah Usaha Kecil yang Meningkatkan Menjadi Usaha Menengah (Pelaku Usaha)</b>	15 pelaku usaha	0.33 %	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	100 %	20 Pelaku Usaha		
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	40 Unit Usaha	7 Jenis Usaha	7 Jenis Usaha	7 Jenis Usaha	100%	597 Unit Usaha		
		Prosentase Peserta yang mengikuti Pelatihan UMKM	-	-	100%	100%	100%	100 Persen		
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	150 Orang	-	-	-	-	180 Orang		
2.17.08.1.01.0005	Penuhunan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	30 Orang	-	-	-	-	-		

## 2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat**

NO	Indikator	SPM/ standa r nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2021 (th n-3)	Tahun 2022 (th n-2)	Tahun 2023 (th n-1)	Tahun 2024 (th n)	Tahun 2025 (th n+1)	Tahun 2026 (th n+2)	Tahun 2021 (th n-3)	Tahun 2022 (th n-2)	Tahun 2023 (th n-1)	Tahun 2024 (th n)	Tahun 2021 (th n-1)	Tahun 2022 (th n)	Tahun 2023 (th n+1)	Tahun 2024 (th n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15		16
1	Prosentase Volume Usaha Koperasi			11%	12%	13%	13,01%			11%	12,30 %			11%	12%			
2	Prosentase Koperasi berkualitas			27%	29%	31%	4,27%			27%	29,79 %			27%	29%			
	a. Prosentase koperasi yang memiliki izin usaha			61,38%	74,87%	91,25 %	86,44%			61,38%	84,75%			61,38%	74,87%			
	b. Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi			2%	5%	8 %	9,74%			2%	9,74%			2%	5%			
	c. Prosentase Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP			5%	15%	25 %	25%			5%	35,29%			5%	15%			
	d. Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet			3%	4%	12,96 %				3%	17,07%			3%	4%			
	e. Volume Usaha Koperasi						6,025 T											
	f. Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya			83,33%	88,89%	95,24 %	100%			83,33%	100%			83,33%	88,89%			
3	Prosentase pertumbuhan UMKM			5%	7%	9 %				5%	0,81%			5%	7%			
4	Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha UMKM						0,16%											
5	Prosentase Usaha Kecil yang naik kelas			0,24%	0,27%	0,32 %	0,08%			0,24%	0,08%			0,24%	0,27%			
	a. Prosentase Volume Usaha kecil yang meningkat			1,37%	1,45%	1,47 %				1,37%	0,14%			1,37%	1,45%			
	b. Prosentase Usaha Kecil yang berkembang			0,03%	0,04%	0,05 %				0,03%	0,20%			0,03%	0,04%			

c. Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya			86.67%	89,39%	90,28 %				86.67%	100%			86.67%	89,39%			
d. Prosentase Pertumbuhan UMKM						0,76%											
e. Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor						0,94%											

- a. Sasaran Capaian Indikator RPD yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :
  1. Prosentase Volume Usaha Koperasi
  2. Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha UMKM
- b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah :
  1. Prosentase koperasi berkualitas
  2. Prosentase Usaha Kecil naik kelas

Secara rinci pencapaian sasaran kinerja diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Target Prosentase Koperasi Berkualitas tahun 2022 adalah 29 %, realisasi tahun 2022 adalah 29,79 % atau sebanyak 981 unit, realisasi tercapai karena program kerja yang dijalankan mendukung tercapainya sasaran kinerja, adanya kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi, UKM Prov Kalbar dengan Dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota dalam upaya melakukan pembinaan, pengawasan dan edukasi kepada koperasi agar menjadi koperasi yang berkualitas dalam aspek kelembagaan, aspek usaha, aspek keuangan, aspek manfaat terhadap anggota, aspek manfaat terhadap masyarakat.
2. Target Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas tahun 2022 adalah 0,27%, realisasi tahun 2022 adalah 0,08%, realisasi belum tercapai karena omzet dari usaha menurun dengan terjadinya pandemi Covid-19 dikarenakan daya beli masyarakat menurun.

## **2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 3 tahun kedepan (tahun 2024-2026) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2018-2023 dan perlu penyelesaian secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan sebelumnya, maka diperoleh 1 (satu) isu-isu strategis yang ada di bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi fokus atau dasar dalam proses pencapaian yaitu ***Mewujudkan Perekonomian yang tumbuh, Inklusif dan berkelanjutan***, adapun isu-isu tersebut adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya daya saing kualitas Koperasi dan UMKM

Dari isu tersebut diatas, maka bagaimana upaya yang akan dilakukan agar koperasi berkualitas terus meningkat jumlahnya melalui program kegiatan yang menunjang sehingga koperasi-koperasi dapat berhasil guna dan berdaya guna, dikelola oleh anggota dan masyarakat secara optimal sesuai aturan-aturan perkoperasian sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi.

Sedangkan untuk UMKM program kegiatan diarahkan bagaimana meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau usaha kecil menengah naik kelas sehingga dapat mengurangi permasalahan ekonomi secara umum yaitu mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tujuan pada RPD yaitu Mewujudkan Perekonomian yang tumbuh, Inklusif dan berkelanjutan.

#### **2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.4.

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB ) Perangkat Daerah (Nilai) 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		85 85	16.818.270.585	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB ) Perangkat Daerah (Nilai) 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		85 85	16.818.270.585
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	65.933.774	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	65.933.774
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	3 Dok	5.661.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	3 Dok	5.661.000
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	1 dok	3.972.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	1 dok	3.972.000
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	2.988.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	2.988.000
2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	3.095.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	3.095.000
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	4 Laporan	7.512.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	4 Laporan	7.512.000

2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	4 Laporan	42.705.774	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	4 Laporan	42.705.774
<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>8.721.597.585</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan</b>		<b>4 Laporan</b>	<b>8.721.597.585</b>
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Pontianak	60 org	8.481.867.585	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Pontianak	60 org	8.481.867.585
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	1 dok	233.280.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	1 dok	233.280.000
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	1 Lap	2.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	1 Lap	2.050.000
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pontianak	1 Lap	2.050.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pontianak	1 Lap	2.050.000
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	1 Lap	2.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	1 Lap	2.350.000
<b>2.17.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>73.814.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>73.814.000</b>
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	2.350.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	2.350.000
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	71.464.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	71.464.000
<b>2.17.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur</b>		<b>100%</b>	<b>59.760.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur</b>		<b>100%</b>	<b>59.760.000</b>
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pontianak	1 Paket	15.790.000	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pontianak	1 Paket	15.790.000



2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pontianak	3 dok	5.130.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pontianak	3 dok	5.130.000
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	1 dok	3.840.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pontianak	1 dok	3.840.000
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	20 orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	20 orang	35.000.000
<b>2.17.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang (%)</b>		<b>100%</b>	<b>495.254.852</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang (%)</b>		<b>100%</b>	<b>495.254.852</b>
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Pontianak	1 paket	28.249.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Pontianak	1 paket	28.249.500
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Pontianak	3 paket	160.673.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Pontianak	3 paket	160.673.000
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Pontianak	3 paket	35.638.352	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Pontianak	3 paket	35.638.352
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Pontianak	2 paket	71.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Pontianak	2 paket	71.400.000
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Pontianak	2 Paket	31.394.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Pontianak	2 Paket	31.394.000
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Pontianak	1 dok	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Pontianak	1 dok	12.000.000
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Pontianak	1 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Pontianak	1 laporan	150.000.000
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	1.800.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	1.800.000

2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	4.100.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Pontianak	1 dok	4.100.000
<b>2.17.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (%)</b>		<b>100%</b>	<b>183.228.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (%)</b>		<b>100%</b>	<b>183.228.000</b>
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pontianak	2 unit	28.638.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pontianak	2 unit	28.638.000
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	Pontianak	1 unit	69.590.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	Pontianak	1 unit	69.590.000
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pontianak	2 unit	85.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pontianak	2 unit	85.000.000
<b>2.17.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.262.937.328</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.262.937.328</b>
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Pontianak	1 Lporan	8.390.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Pontianak	1 Lporan	8.390.000
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Pontianak	3 Laporan	298.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Pontianak	3 Laporan	298.000.000
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Pontianak	7 Laporan	956.547.328	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Pontianak	7 Laporan	956.547.328
<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>		<b>100%</b>	<b>352.728.181</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>		<b>100%</b>	<b>352.728.181</b>
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pontianak	3 unit	50.205.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pontianak	3 unit	50.205.000

2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pontianak	206 Unit	92.038.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pontianak	206 Unit	92.038.000
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pontianak	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pontianak	1 Unit	20.000.000
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pontianak	2 Unit	47.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pontianak	2 Unit	47.300.000
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Prosentase koperasi simpan pinjam/unit simpan yang memiliki ijin usaha</b>	Pontianak	<b>86,44%</b>	<b>327.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Prosentase koperasi simpan pinjam/unit simpan yang memiliki ijin usaha</b>	Pontianak	<b>86,44%</b>	<b>327.000.000</b>
<b>2.17.02.1.01</b>	<b>Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi</b>	Pontianak	<b>100 %</b>	<b>155.503.000</b>	<b>Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi</b>	Pontianak	<b>100 %</b>	<b>155.503.000</b>
2.17.02.1.01.0002	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Pontianak	8 izin	155.503.000	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Pontianak	8 izin	155.503.000
<b>2.17.02.1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	Pontianak	<b>100 persen</b>	<b>171.497.000</b>	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	Pontianak	<b>100 persen</b>	<b>171.497.000</b>
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Pontianak	8 Unit Usaha	171.497.000	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Pontianak	8 Unit Usaha	171.497.000

2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	Pontianak	9,74%	181.607.000	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	Pontianak	9,74%	181.607.000
2.17.03.1.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa</b>	Pontianak	32,5 %	181.607.000	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa</b>	Pontianak	32,5 %	181.607.000
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pontianak	100 kop	181.607.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pontianak	100 kop	181.607.000
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Prosentase Penilaian Kesehatan KSP/USP</b>	Pontianak	25 %	174.840.000	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Prosentase Penilaian Kesehatan KSP/USP</b>	Pontianak	25 %	174.840.000
2.17.04.1.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya</b>	Pontianak	94.10 %	174.840.000	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya</b>	Pontianak	94.10 %	174.840.000
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Pontianak	80 kop	174.840.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Pontianak	80 kop	174.840.000
2.17.05	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan pemahamannya</b>	Pontianak	100 %	2.029.766.000	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan pemahamannya</b>	Pontianak	100 %	2.029.766.000
2.17.05.1.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian</b>	Pontianak	100%	2.029.766.000	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian</b>	Pontianak	100%	2.029.766.000
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Pontianak	210 orang	2.029.766.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Pontianak	210 orang	2.029.766.000
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Volume Usaha Koperasi (Rp)</b>		6.025.000.000.000	812.360.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Volume Usaha Koperasi (Rp)</b>		6.025.000.000.000	812.360.000

<b>2.17.06.1.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Koperasi yang diberdayakan</b>		<b>63.45%</b>	<b>812.360.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Prosentase Koperasi yang diberdayakan</b>		<b>63.45%</b>	<b>812.360.000</b>
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pontianak	40 kop	82.039.900	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pontianak	40 kop	82.039.900
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	Pontianak	80 kop	75.527.500	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	Pontianak	80 kop	75.527.500
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	Pontianak	100 kop	654.792.600	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	Pontianak	100 kop	654.792.600
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Prosentase Pertumbuhan UMKM (%)</b>		<b>0.76 %</b>	<b>1.730.099.013</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Prosentase Pertumbuhan UMKM (%)</b>		<b>0.76 %</b>	<b>1.730.099.013</b>
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Prosentase Usaha Kecil yang Diberdayakan 2. Pertumbuhan Wirausaha (Wirausaha) 3. Prosentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		1) 16.364 2) 33.3 % 3) 9.47 %	1.730.099.013	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	4. Prosentase Usaha Kecil yang Diberdayakan 5. Pertumbuhan Wirausaha (Wirausaha) 6. Prosentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		4) 16.364 5) 33.3 % 6) 9.47 %	1.730.099.013

2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	Pontianak	60 Unit Usaha	345.743.046	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	Pontianak	60 Unit Usaha	345.743.046
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	Pontianak	60 orang	169.014.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	Pontianak	60 orang	169.014.000
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	Pontianak	500 Unit Usaha	5.820.000	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	Pontianak	500 Unit Usaha	5.820.000
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	Pontianak	210 Orang	1.006.661.967	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	Pontianak	210 Orang	1.006.661.967
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Pontianak	3 Unit Usaha	98.000.000	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Pontianak	3 Unit Usaha	98.000.000
2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	Pontianak	40 Unit Usaha	54.770.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	Pontianak	40 Unit Usaha	54.770.000
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	Pontianak	40 Unit Usaha	50.090.000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	Pontianak	40 Unit Usaha	50.090.000
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)</b>		<b>0.94 %</b>	<b>490.530.033</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)</b>		<b>0.94 %</b>	<b>490.530.033</b>
<b>2.17.08.1.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah Usaha Kecil yang Meningkatkan Menjadi Usaha Menengah (Pelaku Usaha)</b>		<b>15 pelaku usaha</b>	<b>490.530.033</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah Usaha Kecil yang Meningkatkan Menjadi Usaha Menengah (Pelaku Usaha)</b>		<b>15 pelaku usaha</b>	<b>490.530.033</b>
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Pontianak	40 Unit Usaha	240.250.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Pontianak	40 Unit Usaha	240.250.000

2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	Pontianak	150 orang	201.975.033	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	Pontianak	150 orang	201.975.033
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	Pontianak	30 orang	48.305.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	Pontianak	30 orang	48.305.000
<b>TOTAL</b>					<b>16.818.270.585</b>					<b>16.818.270.585</b>



## **2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat usulan program, kegiatan maupun sub kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas dan Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan amanat Permendagri 90 tahun 2019. Namun di dalam item kegiatan sedikit mengalami perubahan, dimana adanya item-item kegiatan yang menyesuaikan dengan hasil asistensi bersama Gubernur yang dianggap dapat mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan KUMKM di Kalimantan Barat.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu : 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan

- UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
  4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024;
  5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong. Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020-2024, yaitu :

**Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Koperasi.

**Agenda ke-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.**

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Distribusi pusat-pusat Pertumbuhan Ke Wilayah (PKW) belum berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis (IPTEK) kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
5. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Upaya untuk mengurangi daerah tertinggal masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal, akibatnya kapasitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal. Sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, menjadi prasyarat dibutuhkan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan adalah strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

Strategi pertumbuhan adalah strategi berbasis ekonomi yang dilaksanakan pada daerah-daerah yang memiliki daya kompetitif yang tinggi dengan mendorong operasionalisasi dan meningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Sementara itu strategi pemerataan adalah strategi yang mendorong pertumbuhan pusat-pusat aktivitas melalui: 1. pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian dengan memperhatikan karakteristik aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi, dan 2. pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

### **3. 2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk periode 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 3 (tiga) tahun mendatang, berikut tujuan dan sasaran, indikator dan target indikator

jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026.

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya daya saing produktivitas unggulan daerah yang inklusif dan berkelanjutan		Prosentase Koperasi Berkualitas	4,57 %	4,61%	4,61%		
			Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas	0,08 %	0,09%	0,011 %		
		1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase koperasi simpan pinjam/unit simpan yang memiliki ijin usaha	86.44%	87,10%	87,69%		
			Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	9,74 %	10,71%	11,69%		
			Prosentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	25,00%	25,61%	26,19%		
			Volume Usaha Koperasi (Rp)	6,025 T	6,03 T	6,035 T		
			Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang meningkat Pemahamannya	100%	100%	100%		
			2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Prosentase Pertumbuhan UMKM	0,76%	1,01%	1.25 %	
		Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	0,94%	0,98%	1,05%			

### 4. 3. Program dan Kegiatan

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dalam menjalankan pembangunan koperasi usaha mikro kecil menengah di daerah serta berpedoman pada kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Untuk kegiatan bidang perkoperasian khususnya dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi dan menjadikan koperasi aktif dan berkualitas kegiatan dilaksanakan di kabupaten kota dan fokus pendataan dan pembinaan kepada koperasi tidak aktif agar menjadi aktif, dan mempertahankan koperasi aktif agar tetap aktif dan berkualitas. Memfokuskan pada pengembangan koperasi-koperasi sektor riil seperti koperasi produksi di bidang pertanian, perkebunan serta nelayan yang terfokus di kawasan/daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka pengawasan koperasi diarahkan kepada seluruh jenis koperasi (produksi, Konsumen, pemasaran, KSP, jasa) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang perkoperasian menuju koperasi sehat, kuat dan mandiri.

Di bidang UMKM kegiatan lebih terfokus pada bagaimana mengembangkan UMKM agar naik kelas melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM agar menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan produk luar bahkan ke luar negeri.

Dalam meningkatkan kualitas produksi dan sumber daya manusia KUMKM, dan menjadi koperasi aktif dilaksanakan pelatihan-pelatihan baik dilaksanakan di provinsi/kabupaten/kota.

Untuk tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah 8 (delapan) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 54 (Lima puluh empat) Sub Kegiatan.
2. Pagu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 16.818.270.585,-.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Pagu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 16.818.270.585,- dengan rincian Program dan Kegiatan Renja 2024 adalah sebagai berikut :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi	Pagu Indikatif
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			
			Indikator	Target	Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.818.270.585
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							16.818.270.585
2.17.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB ) Perangkat Daerah (Nilai) 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)						11.072.068.539
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	100%				65.933.774
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	Pontianak	5.661.000
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	Pontianak	3.972.000
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	Pontianak	2.988.000
2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Pontianak	3.095.000
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	Pontianak	7.512.000
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Pontianak	42.705.774

<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Keuangan</b>	<b>4 Laporan</b>				<b>8.721.597.585</b>
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	60 orang	Pontianak	8.481.867.585
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	Pontianak	233.280.000
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	Pontianak	2.050.000
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 lap	Pontianak	2.050.000
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1 lap	Pontianak	2.350.000
<b>2.17.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>				<b>73.814.000</b>
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 dok	Pontianak	2.350.000
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 dok	Pontianak	71.464.000
<b>2.17.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur</b>	<b>100%</b>				<b>59.760.000</b>
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	Pontianak	15.790.000
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3 dok	Pontianak	5.130.000
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1 dok	Pontianak	3.840.000
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20 orang	Pontianak	35.000.000

<b>2.17.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Barang (%)</b>	<b>100%</b>				<b>495.254.852</b>
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	Pontianak	28.249.500
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	Pontianak	160.673.000
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3 paket	Pontianak	35.638.352
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2 paket	Pontianak	71.400.000
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Pontianak	31.394.000
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 dok	Pontianak	12.000.000
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 laporan	Pontianak	150.000.000
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 dok	Pontianak	1.800.000
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1 dok	Pontianak	4.100.000
<b>2.17.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (%)</b>	<b>100%</b>				<b>183.228.000</b>
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 unit	Pontianak	28.638.000
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1 unit	Pontianak	69.590.000

2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 unit	Pontianak	85.000.000
<b>2.17.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100%</b>				<b>1.262.937.328</b>
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 laporan	Pontianak	8.390.000
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3 laporan	Pontianak	298.000.000
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7 Laporan	Pontianak	956.547.328
<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (%)</b>	<b>100%</b>				<b>352.728.181</b>
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3 unit	Pontianak	50.205.000
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	206 Unit	Pontianak	92.038.000
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	Pontianak	20.000.000
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	Pontianak	47.300.000
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Prosentase koperasi simpan pinjam/unit simpan yang memiliki ijin usaha (%)</b>		<b>86.44 %</b>				<b>327.000.000</b>
<b>2.17.02.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Prosentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi (%)</b>	<b>100 %</b>				<b>155.503.000</b>
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	8 unit usaha	Pontianak	155.503.000

2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Prosentase Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (%)	100 %				171.497.000
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	10 unit usaha	Pontianak	. 171.497.000
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>		9.74 %				181.607.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Prosentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa (%)	32.5 %				181.607.000
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	100 Kop	Kabupaten/Kota	181.607.000
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Prosentase Penilaian Kesehatan KSP/USP</b>		25 %				174.840.000
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Prosentase Koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya (%)	94,1 %				174.840.000
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	80 kop	Kabupaten/Kota	174.840.000
2.17.05	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya (%)</b>		100%				2.029.766.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian (%)	100%				2.029.766.000
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	210 org	Pontianak	2.029.766.000

2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Volume Usaha Koperasi</b>		6.025.000.000.000				<b>812.360.000</b>
2.17.06.1.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Prosentase Koperasi yang Diberdayakan (%)</b>	<b>63.45%</b>				<b>812.360.000</b>
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	40 kop	Pontianak	82.039.900
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	80 kop	Pontianak	75.527.500
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	100 kop	Pontianak	654.792.600
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Prosentase Pertumbuhan UMKM (%)</b>		<b>0.76 %</b>				<b>1.730.099.013</b>
2.17.07.1.01	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		1. <b>Pertumbuhan Wirausaha</b> 2. <b>Prosentase Usaha Kecil yang Diberdayakan (%)</b> 3. <b>Prosentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)</b>	7) <b>16.364</b> 8) <b>33.3 %</b> 9) <b>9.47 %</b>				<b>1.730.099.013</b>
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	60 Unit Usaha	Pontianak	345.743.046
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	60 orang	Pontianak	169.014.000

2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil				Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	500 Unit Usaha	Pontianak	5.820.000
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	210 Orang	Pontianak	1.006.661.967
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil				Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	3 Unit Usaha	Pontianak	98.000.000
2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	40 Unit Usaha	Pontianak	54.770.000
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	40 Unit Usaha	Pontianak	50.090.000
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)</b>		<b>0.94 %</b>				<b>490.530.033</b>
<b>2.17.08.1.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>		<b>Jumlah Usaha Kecil yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah (Pelaku Usaha)</b>	<b>15 pelaku usaha</b>				<b>490.530.033</b>
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	40 Unit Usaha	Pontianak	240.250.000
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	150 orang		201.975.033
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	30 orang		48.305.000



## BAB V PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini dibuat dalam rangka menjaga konsistensi dari kebijakan yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk mensinkronkan Renja Tahun 2024 Dinas yang membidangi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kab/Kota.

Selanjutnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan. Dengan ketersediaan dana yang ada dapat mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan dengan hasil kinerja yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya dan masyarakat perkoperasian dan UMKM pada khususnya.

Pontianak, Juli 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. JUMAIDI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650809 198603 1 012